

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki permasalahan yang kompleks yaitu pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang harus dapat diatasi karena mengakibatkan permasalahan sosial dan meningkatkan kemiskinan. Pengangguran terjadi karena tidak tersedia lapangan kerja sehingga masyarakat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak tercukupi kebutuhan dasarnya. Kondisi ekonomi di Indonesia menghadapi masalah tidak seimbang kondisi internal. Masalah internal yaitu tingkat output yang tidak memenuhi kesempatan kerja penuh (Boediono, 1999).

Alasan memilih topik disini karena pengangguran merupakan masalah utama yang penanganannya terus diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi kompleksnya masalah pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang memiliki pengaruh pada kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Pengangguran merupakan masalah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat masalah yang terdapat pada ketidakseimbangan sumber daya manusia yaitu jumlah penduduk yang tinggi, sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran yang tinggi ketika lapangan kerja lebih sedikit.

Permasalahan pada urusan ketenagakerjaan yaitu masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, serta

rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Masalah pengangguran merupakan masalah utama di negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Beberapa penelitian menyebutkan banyak faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran termasuk IPM, Pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin, dan UMP

Penelitian pengangguran terbuka dilakukan di delapan provinsi yang terdapat di pulau Sumatera. Pengangguran di provinsi yang terdapat di pulau Sumatera jumlahnya berfluktuatif dan berbeda antar provinsi dari tahun 2013 hingga 2017. Tingkat pengangguran terbuka terbesar di Pulau Sumatera terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,12%. Angka ini menjelaskan bahwa setiap 10 orang menjadi pengangguran dari 100 angkatan kerja di 2013. Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka yang terendah terdapat di provinsi Bangka Belitung pada tahun 2016 sebesar 2,6%. Setiap daerah perlu adanya jumlah tingkat pengangguran yang stabil, tetapi dalam perekonomian selalu terdapat masalah pengangguran. Masalah pengangguran terdapat di pulau Sumatera dapat menjadi beban karena tidak mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Terjadinya pengangguran tersebut dapat menjadi sumber terhadap kenaikan kemiskinan sehingga dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.

Jumlah pengangguran yang tinggi dan terdapat perbedaan di tiap provinsi perlu menjadi perhatian lebih. Setiap waga negara memerlukan terpenuhi kebutuhan dasar dan supaya dapat aktif memaksimalkan potensi

ekonomi. Jumlah lapangan kerja yang lebih kecil dibanding jumlah angkatan kerja menciptakan tenaga kerja yang menjadi pengangguran. Seharusnya kebijakan fiskal pemerintah menitikberatkan pada pemerataan investasi di bidang ekonomi daerah.

Pengangguran terbuka yaitu tenaga kerja yang sedang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi karena seseorang yang sedang mencari pekerjaan namun belum mendapat pekerjaan. Pengangguran terjadi karena kesempatan kerja yang lebih sedikit dibanding jumlah pencari kerja. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat di tabel 1.1 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera

No	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jambi	4,76	5,08	4,34	4	3,87
2	Sumatera Barat	7,02	6,5	6,89	5,09	5,58
3	Riau	5,48	6,56	7,83	7,43	6,22
4	Kepulauan Riau	5,63	6,69	6,2	7,69	7,16
5	Sumatera Utara	6,45	6,23	6,71	5,84	5,6
6	Aceh	10,12	9,02	9,93	7,57	6,57
7	Sumatera Selatan	4,84	4,96	6,07	4,31	4,39
8	Bengkulu	4,61	3,47	4,91	3,3	3,74
9	Lampung	5,69	4,79	5,14	4,62	4,33
10	Bangka Belitung	3,65	5,14	6,29	2,6	3,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dinilai penting dalam menganalisa pembangunan ekonomi untuk melihat kerja suatu perekonomian negara maupun perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi

dari wilayah negara jika terjadi peningkatan di setiap periodenya dapat menjelaskan perekonomian yang berkembang dengan baik (Alghofari, 2010) . Tingkat pengangguran sendiri berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi dari berbagai pendapat para ekonom. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat otomatis menambah lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan dari jumlah penduduk yang terus bertambah dapat meningkatkan kebutuhan belanja konsumsi masyarakat, maka penambahan pendapatan masyarakat diperlukan. Meningkatnya jumlah penduduk tentu harus diikuti dengan penambahan lapangan kerja yang cukup, jika tidak terjadi maka akan menambah ketimpangan pendapatan dan dapat meningkatkan kemiskinan (Sitepu dkk. 2009).

Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk wilayah regional. Dalam ekonomi agregat secara keseluruhan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan GDP berarti dapat meningkatkan pendapatan nasional. Terjadinya peningkatan nilai tambah output produksi barang dan jasa dari wilayah regional dapat diwujudkan dengan peningkatan PDRB. PDRB dapat memperlihatkan kerja pembangunan ekonomi dan arah perekonomian daerah. Namun, jika tingkat PDRB yang tinggi juga tidak menggambarkan apakah semua lapisan masyarakat menikmati dampak dari pembangunan ekonomi. PDRB dari provinsi yang ada di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2013-2017

No	Provinsi	PDRB (Milyar Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jambi	111766,1	119991,4	125037	130501	136557
2	Sumatera Barat	125940,6	133340,8	140719	148134	155964
3	Riau	436187,5	447986,8	448992	458997	471420
4	Kepulauan Riau	137263,9	146325,2	155131	162924	166198
5	Sumatera Utara	398727,1	419573,3	440965	463775	487531
6	Aceh	111755,8	113490,4	112666	116384	121263
7	Sumatera Selatan	232175	243297,8	254045	266854	281544
8	Bengkulu	34326,4	36207,1	38066	40080	42080
9	Lampung	180620	189797,5	199537	209814	220657
10	Bangka Belitung	42190,9	44159,4	45962	47851	50008

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatnya pendapatan nasional negara disertai dengan proses dari perubahan struktur ekonomi, kelembagaan, mengurangnya tingkat ketimpangan dan kemiskinan (Todaro, 2006). Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dengan peningkatan pendapatan tetapi juga melihat terjadinya distribusi pendapatan dan manfaat pembangunan. Salah satu indikator dari pembangunan ekonomi adalah tingkat pengangguran. Dengan tingkat pengangguran dapat melihat terjadinya kesenjangan dari pembagian pendapatan yang diterima masyarakat. Permasalahan utama yaitu kondisi pembangunan yang tidak mampu menciptakan kesempatan kerja sedangkan jumlah penduduk meningkat tinggi. Sehingga dapat meningkatkan jumlah kemiskinan akibat dari terjadinya pengangguran (Rubijanto dkk. 2012). Meningkatnya jumlah penduduk miskin merupakan akibat dari hasil pembangunan ekonomi yang tidak dapat

memberikan manfaat oleh setiap masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera Tahun 2013-2017

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jambi	281570	281750	311560	290810	278610
2	Sumatera Barat	380630	354740	349530	376510	359990
3	Riau	522530	498280	562920	501590	496390
4	Kepulauan Riau	125020	124170	114830	119140	128430
5	Sumatera Utara	1390800	1360000	1508140	1452550	1326570
6	Aceh	855710	837420	859410	841310	829800
7	Sumatera Selatan	1108210	1085800	1112530	1096500	1086760
8	Bengkulu	320410	316500	322830	325600	302620
9	Lampung	1134280	1143940	1100680	1139780	1083740
10	Bangka Belitung	70900	67230	66620	71700	76200
	Total	6190060	6069830	6309050	6215490	5969110

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Indikator yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran di suatu daerah regional adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan PDRB, jumlah keseluruhan penduduk, jumlah penduduk miskin, UMP, dan IPM. Upah Minimum Regional (UMP) adalah hal yang mempengaruhi dibidang ketenagakerjaan, yaitu terjadinya peningkatan upah dapat menimbulkan permintaan tenaga kerja turun yang dapat meningkatkan pengangguran. Sebaliknya, jika tingkat upah menurun maka dapat meningkatkan permintaan input tenaga kerja. Sedangkan besar upah yang

diberikan maka memiliki pengaruh pada biaya produksi, semakin besar upah minimum yang ditetapkan pemerintah, maka biaya produksi semakin meningkat. Perusahaan akan mengurangi input tenaga kerja untuk menekan biaya produksi supaya efisien, sehingga dapat meningkatkan pengangguran (Ball, Gregory Mankiw, & Reis, 2005).

Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi Pulau Sumatera tahun 2013-2017

No	Provinsi	Upah Minimum Provinsi (Juta Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jambi	1300000	1502230	1710000	1906650	2063949
2	Sumatera Barat	1350000	1490000	1615000	1800725	1949285
3	Riau	1400000	1700000	1878000	2095000	2266723
4	Kepulauan Riau	1365087	1665000	1954000	2178710	2358454
5	Sumatera Utara	1375000	1505850	1625000	1811875	1961354
6	Aceh	1550000	1750000	1900000	2118500	2500000
7	Sumatera Selatan	1350000	1825000	1974000	2206000	2388000
8	Bengkulu	1200000	1350000	1500000	1605000	1730000
9	Lampung	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
10	Bangka Belitung	1265000	1640000	2100000	2341500	2534673

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator dalam pembangunan wilayah yang memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan suatu wilayah regional. Jika suatu daerah mempunyai nilai IPM yang tinggi, maka kualitas hidup masyarakat daerah tersebut tinggi, maka tingkat kemiskinan daerah rendah. Indikator dari IPM dapat digambarkan

dengan angka harapan hidup yang menunjukkan bidang kesehatan, angka melek huruf yang menunjukkan bidang pendidikan, dan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera dapat dilihat di tabel 1.5.

Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sumatera tahun 2013-2017

No	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jambi	67,76	68,24	68,89	69,62	69,99
2	Sumatera Barat	68,91	69,36	69,98	70,73	71,24
3	Riau	69,91	70,33	70,84	71,2	71,79
4	Kepulauan Riau	73,02	73,4	73,75	73,99	74,45
5	Sumatera Utara	68,36	68,87	69,51	70	70,57
6	Aceh	68,3	68,81	69,45	70	70,6
7	Sumatera Selatan	66,16	66,75	67,46	68,24	68,86
8	Bengkulu	67,5	68,06	68,59	69,33	69,95
9	Lampung	65,73	66,42	66,95	67,65	68,25
10	Bangka Belitung	67,92	68,27	69,05	69,55	69,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Pengangguran memiliki dampak buruk pada perekonomian negara, karena dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber pemasukan negara tertinggi dan pajak sebagian besar didapatkan dari pendapatan masyarakat (Sulistyowati, 2013). Jika pengangguran tinggi maka penerimaan pendapatan pajak akan berkurang mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Keadaan tenaga kerja yang menganggur karena tidak

mendapat pengalaman bekerja dapat menyebabkan menurunnya keterampilan yang tidak dimanfaatkan. Tenaga kerja yang menganggur karena mendapat beban psikologi karena tidak dapat menghasilkan pendapatan, juga terjadi kemiskinan yang dapat menyebabkan perilaku kriminalitas.

Permasalahan pengangguran merupakan masalah strategis di pulau Sumatera yaitu tingginya jumlah pengangguran. Maka dari itu pengangguran merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah supaya dapat merumuskan jalan keluar dan langkah yang strategis dalam menangani masalah pengangguran.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang maka penulis meneliti tentang pengaruh dari variabel PDRB, jumlah keseluruhan penduduk, jumlah penduduk miskin, UMP, dan IPM terhadap tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada tahun 2013 hingga 2017.

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
2. Bagaimana pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
3. Bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk miskin terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
4. Bagaimana pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam hal ini peneliti ingin membuat gambaran apa saja yang ingin dicapai dan apa manfaatnya yang akan didapatkan agar bisa menjadi patokan untuk penelitian penelitian selanjutnya.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk miskin terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ingin memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat

Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat baik yang berkepentingan atau tidak dan bisa juga sebagai acuan bagi seluruh masyarakat Indonesia

2. Untuk Dunia Ilmu Pengetahuan dan teknologi

Diharapkan memberikan ilmu pada bidang ketenagakerjaan khususnya pada provinsi provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dan juga

diharapkan memberikan bantuan ide dan pemikiran kepada pemerintah setempat yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran terdidik ini.

3. Untuk Peneliti

Dijadikan sebagai pelajaran dan dapat menerapkan teori yang dipakai sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori yang digunakan seta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk membuat penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang variabel penelitian serta definisi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penggambaran objek penelitian, analisa data dan pembahasan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan dari analisa data serta pembahasan. Bab ini berisi implikasi dapat diberikan dalam penelitian.